

IMPLEMENTASI PANCASILA DAN CIVIL SOCIETY ERA REFORMASI

Kamdani¹, Rizki Fikriansyah Siregar², Sahnansauri Sinaga³

¹²³Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

kamdani4003243004@uinsu.ac.id¹, fikrisrg1321@gmail.com², sahnansinaga91@gmail.com³

Abstrak

Penelitian ini membahas hubungan antara Pancasila sebagai dasar negara dengan peran civil society dalam membangun masyarakat yang adil dan beradab di Indonesia, khususnya di era reformasi. Setiap sila Pancasila memberikan panduan nilai moral dan etika yang relevan untuk mendukung penguatan civil society, mulai dari pluralisme agama, pembelaan hak asasi manusia, integrasi nasional, hingga demokrasi partisipatif. Dalam implementasinya, civil society berperan penting dalam mendukung transparansi, keadilan sosial, dan pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai tantangan, seperti polarisasi politik, disinformasi, dan globalisasi, serta peluang dari teknologi digital, kolaborasi multi-stakeholder, dan peran generasi muda. Hasil penelitian menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor lainnya untuk menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, visi Pancasila sebagai panduan membangun masyarakat yang harmonis, inklusif, dan berkeadilan dapat diwujudkan.

Kata kunci: Pancasila, civil society, masyarakat sipil, era reformasi, nilai-nilai moral.

Abstract

This study discusses the relationship between Pancasila as the foundation of the state and the role of civil society in building a just and civilized society in Indonesia, especially in the reform era. Each principle of Pancasila provides guidance on relevant moral and ethical values to support the strengthening of civil society, ranging from religious pluralism, human rights advocacy, national integration, to participatory democracy. In its implementation, civil society plays an important role in supporting transparency, social justice, and sustainable development. This study also identifies various challenges, such as political polarization, disinformation, and globalization, as well as opportunities from digital technology, multi-stakeholder collaboration, and the role of the younger generation. The results of the study emphasize the importance of

Article History

Received: -

Reviewed: -

Published: -

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/Tashdiq.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Tashdiq



This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-NonCommercial
4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

collaboration between the government, civil society, and other sectors to internalize the values of Pancasila in everyday life. Thus, the vision of Pancasila as a guide to building a harmonious, inclusive, and just society can be realized.

Keywords: Pancasila, civil society, civil society, reform era, moral values.

1. Pendahuluan

Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia memiliki kedudukan fundamental yang meliputi asas kerohanian, suasana batin, serta cita-cita hukum yang menjadi pedoman hidup bangsa. Sebagai sumber nilai dan norma, Pancasila tidak hanya tercermin dalam hukum tertulis, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetapi juga dalam hukum yang tidak tertulis, yang tumbuh dan berkembang dari budaya serta tradisi bangsa Indonesia (Kaelan, 2010). Nilai-nilai Pancasila, yang meliputi Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, berfungsi sebagai panduan moral dan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam kehidupan berbangsa yang beragam, implementasi nilai-nilai Pancasila menjadi sangat penting untuk mencegah perpecahan yang dapat merugikan individu maupun negara. Sebagai ideologi bangsa, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar hukum, tetapi juga sebagai pengikat sosial yang memungkinkan berbagai kelompok masyarakat hidup berdampingan dalam harmoni. Nilai-nilai ini harus diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari agar masyarakat memiliki pandangan yang sama dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama di tengah keberagaman budaya, agama, dan adat istiadat (Notonagoro, 1984).

Era reformasi membawa tantangan baru dalam pengimplementasian nilai-nilai Pancasila. Salah satu tantangan terbesar adalah membangun masyarakat madani (civil society) yang mengedepankan prinsip demokrasi, keadilan, dan kesetaraan. Civil society, sebagai bagian penting dari kehidupan demokrasi, memiliki peran strategis dalam mewujudkan cita-cita Pancasila. Namun, dalam praktiknya, implementasi nilai-nilai Pancasila seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti dinamika politik, pengaruh globalisasi, serta polarisasi sosial yang dapat mengancam persatuan bangsa (Surbakti, 2010).

Keberhasilan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam konteks civil society sangat bergantung pada pemahaman masyarakat terhadap esensi nilai-nilai tersebut. Ketuhanan Yang Maha Esa, misalnya, tidak hanya menekankan pada keberagaman, tetapi juga pada penghormatan terhadap kebebasan beragama. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab mendorong masyarakat untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menolak segala bentuk diskriminasi. Nilai Persatuan Indonesia menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman. Sementara itu, nilai Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan mengajarkan pentingnya

musyawarah untuk mencapai konsensus dalam pengambilan keputusan. Terakhir, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia menggarisbawahi pentingnya pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat tanpa terkecuali (Kaelan, 2010).

Namun, tantangan dalam mengimplementasikan nilai-nilai tersebut tidak dapat diabaikan. Dinamika sosial-politik yang terus berubah, pengaruh teknologi dan media sosial, serta lemahnya pemahaman masyarakat terhadap Pancasila menjadi faktor penghambat yang signifikan. Sebagai contoh, polarisasi politik yang sering muncul dalam masyarakat menunjukkan adanya ketimpangan dalam memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, globalisasi juga membawa nilai-nilai baru yang kadang bertentangan dengan nilai-nilai lokal, sehingga masyarakat perlu selektif dalam menyikapi pengaruh global tersebut (Effendi, 2007).

Di sisi lain, era reformasi juga memberikan peluang besar untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila. Demokratisasi yang berkembang memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan politik, yang sejalan dengan nilai kerakyatan dan permusyawaratan. Selain itu, kemajuan teknologi juga dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan pemahaman tentang Pancasila secara lebih luas, melalui media digital dan platform pembelajaran online.

Dengan mempertimbangkan berbagai tantangan dan peluang ini, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan institusi pendidikan untuk menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan karakter berbasis Pancasila harus terus diperkuat, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, untuk memastikan generasi muda memahami dan mampu mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan mereka (Sutrisno, 2012).

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi nilai-nilai Pancasila dalam praktik civil society, khususnya di era reformasi, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang yang ada. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya memperkuat peran Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa di tengah dinamika kehidupan modern.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini memanfaatkan bahan utama berupa sumber primer dan sekunder yang relevan dengan konsep reward dalam filsafat pendidikan Islam. Sumber primer mencakup teks fundamental seperti Al-Qur'an, Hadits, dan karya para ulama besar, termasuk Al-Ghazali dan Ibn Sina, yang memberikan landasan konseptual tentang reward dalam pendidikan Islam. Selain itu, sumber sekunder digunakan untuk memperkaya analisis, meliputi jurnal ilmiah, buku, dan artikel akademik yang membahas reward dalam pendidikan Islam serta teori motivasi pendidikan secara umum. Data diperoleh melalui penelusuran literatur dari database akademik seperti Google Scholar, JSTOR, dan Scopus. Langkah ini memastikan bahan yang digunakan memiliki relevansi dan validitas tinggi dalam mendukung penelitian (Andini, 2023; Purwaningsih, 2022).

Pengumpulan sampel data dilakukan melalui pendekatan studi kepustakaan (library research) yang terfokus pada teks-teks terkait konsep reward dalam pendidikan Islam. Literatur dipilih berdasarkan relevansi terhadap topik utama penelitian, terutama dimensi spiritual, moral, dan sosial reward. Sumber utama, seperti Al-Qur'an dan Hadits, dianalisis untuk menggali landasan teologis dan filosofis konsep reward, sementara sumber sekunder digunakan untuk menambahkan perspektif teoretis dan praktis. Penelusuran literatur dilakukan dengan menggunakan kata kunci seperti "reward dalam pendidikan Islam," "filsafat pendidikan Islam," dan "teori motivasi Islami." Dengan metode ini, sampel teks yang relevan dapat diidentifikasi dan dievaluasi secara efektif (Wati, 2023).

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif yang memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap konsep reward dalam filsafat pendidikan Islam. Metode studi kepustakaan diterapkan dengan memfokuskan pada analisis konten teks-teks primer dan sekunder. Prosedur penelitian dimulai dengan identifikasi literatur melalui database akademik untuk menemukan sumber-sumber yang relevan. Langkah berikutnya adalah mengevaluasi literatur berdasarkan relevansinya dengan tema utama penelitian, yaitu reward dalam pendidikan Islam. Analisis konten kemudian dilakukan untuk mengidentifikasi dimensi-dimensi utama reward, seperti spiritual, moral, dan sosial, serta relevansinya dalam pendidikan modern (Andini, 2023; Fernanda et al., 2022).

Penelitian ini mengkaji tiga dimensi utama dari konsep reward dalam pendidikan Islam: spiritual, moral, dan sosial. Dimensi spiritual melibatkan analisis bagaimana reward dapat meningkatkan kesadaran siswa terhadap nilai-nilai religius dan hubungan mereka dengan Allah SWT, seperti dorongan untuk berperilaku baik demi mendapatkan ridha Allah. Dimensi moral menyoroti bagaimana reward dapat berkontribusi pada pembentukan karakter siswa, termasuk nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin. Sedangkan dimensi sosial mengkaji peran reward dalam memperkuat hubungan interpersonal antara siswa, guru, dan orang tua. Setiap dimensi dianalisis berdasarkan data dari Al-Qur'an, Hadits, dan literatur pendukung untuk memastikan interpretasi yang relevan dengan nilai-nilai Islam (Nikmah, 2023; Purwaningsih, 2022).

Sebagai penelitian kualitatif, analisis statistik numerik tidak digunakan dalam studi ini. Sebaliknya, analisis konten diterapkan untuk menggali tema-tema utama yang terkandung dalam data. Proses analisis dimulai dengan koding data, yaitu mengkategorikan informasi dari teks berdasarkan dimensi spiritual, moral, dan sosial reward. Tahap berikutnya adalah identifikasi tema-tema utama, seperti hubungan antara reward dengan pembentukan akhlak dan motivasi spiritual siswa. Akhirnya, data diinterpretasikan untuk memahami hubungan reward dengan tujuan pendidikan Islam, khususnya dalam pembentukan karakter siswa di era modern. Pendekatan ini memastikan hasil penelitian dapat menjawab pertanyaan penelitian secara teoritis dan praktis (Wati, 2023; Purwaningsih, 2022).

4. Hasil dan Pembahasan

Hubungan Pancasila dan Civil Society

Adam B. Seligman mendefinisikan civil society sebagai seperangkat gagasan etis yang diwujudkan dalam berbagai tatanan sosial. Salah satu inti dari gagasan ini adalah menyelaraskan

berbagai pertentangan kepentingan antara individu dengan masyarakat serta antara masyarakat dengan kepentingan negara (Seligman, 1992). Civil society atau masyarakat sipil, dalam arti generiknya, sering dipahami sebagai 'civilized society', yaitu masyarakat beradab yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika.

Sebagai dasar negara, Pancasila memiliki hubungan erat dengan masyarakat sipil. Nilai-nilai dalam Pancasila mendukung pembentukan masyarakat sipil yang beradab, menghormati pluralisme, serta menjunjung tinggi moralitas. Nilai-nilai seperti Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Permasyarakatan, dan Keadilan memberikan kerangka etis dan normatif bagi masyarakat Indonesia untuk berinteraksi secara harmonis di tengah keberagaman (Kaelan, 2010).

Dengan landasan Pancasila, masyarakat dapat membangun sistem komunikasi yang saling membutuhkan, memelihara identitas kelompok, dan menerima pluralisme dengan menghormati perbedaan antar kelompok. Bahmueller (1992) menyatakan bahwa civil society menekankan kesetiaan (loyalty) dan kepercayaan (trust) sehingga individu mengakui keterkaitannya dengan orang lain dan tidak mementingkan diri sendiri. Hal ini sejalan dengan cita-cita Pancasila untuk menciptakan masyarakat yang beradab, inklusif, dan toleran.

Implementasi Nilai Pancasila dalam Civil Society Era Reformasi

1. Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa

- Pluralisme Agama: Civil society mempromosikan toleransi antaragama dengan mendorong dialog lintas iman dan mencegah konflik horizontal berbasis agama (Effendi, 2007). Misalnya, berbagai forum lintas agama berperan aktif dalam meredam potensi konflik.
- Moderatisme: Organisasi masyarakat sipil menyebarkan nilai-nilai moderatisme untuk menangkal radikalisme, seperti melalui program pendidikan dan kampanye damai (Rahardjo, 2002).
- Agama sebagai Sumber Inspirasi: Banyak organisasi berbasis agama yang terlibat dalam kegiatan sosial, seperti lembaga zakat, yayasan pendidikan, dan program kemanusiaan lainnya.

2. Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

- Pembelaan Hak Asasi Manusia: Civil society memperjuangkan hak kelompok rentan, seperti perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Contohnya, Komnas Perempuan aktif dalam advokasi hak-hak perempuan.
- Keadilan Sosial: Program pemberdayaan masyarakat, bantuan hukum, dan advokasi kebijakan publik menjadi fokus utama untuk mewujudkan keadilan sosial (Fukuyama, 1995).
- Perdamaian: Civil society berperan dalam rekonsiliasi pasca konflik melalui trauma healing dan dialog antar kelompok (Galtung, 1996).

3. Sila Ketiga: Persatuan Indonesia

- Integrasi Nasional: Civil society memperkuat persatuan bangsa dengan mempromosikan keberagaman budaya dan etnis melalui program kebudayaan.
- Kewarganegaraan: Partisipasi aktif masyarakat dalam kehidupan berbangsa didorong melalui pendidikan kewarganegaraan (Prasetyo, 2018).

- Anti-Diskriminasi: Kampanye melawan diskriminasi berbasis SARA menjadi fokus banyak organisasi masyarakat sipil.
4. Sila Keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
- Demokrasi Partisipatif: Masyarakat sipil mendorong musyawarah dan dialog dalam pengambilan keputusan publik (Dahl, 1989).
 - Transparansi dan Akuntabilitas: Organisasi masyarakat sipil seperti Indonesia Corruption Watch (ICW) memantau kinerja pemerintah untuk memastikan transparansi.
 - Good Governance: Prinsip-prinsip tata kelola yang baik dipromosikan untuk meningkatkan kualitas demokrasi.
5. Sila Kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
- Pembangunan Berkelanjutan: Civil society mendukung pembangunan yang memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi.
 - Pengentasan Kemiskinan: Program pemberdayaan ekonomi masyarakat dilakukan melalui pelatihan keterampilan dan dukungan usaha kecil.
 - Perlindungan Lingkungan: Civil society berkontribusi dalam kampanye pelestarian lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan (Sachs, 2015).
- Tantangan dan Peluang di Masa Depan
1. Tantangan
- Polarisasi dan Radikalisme: Polarisasi politik di media sosial dan munculnya kelompok radikal menjadi ancaman nyata bagi kerukunan bangsa (Sunstein, 2001).
 - Disinformasi dan Hoaks: Penyebaran hoaks merusak kepercayaan publik terhadap lembaga negara dan organisasi masyarakat sipil (Wardle & Derakhshan, 2017).
 - Perubahan Iklim: Dampak perubahan iklim menambah beban bagi masyarakat sipil untuk mengatasi konflik sosial yang muncul akibat bencana alam.
 - Globalisasi: Tantangan dalam mempertahankan identitas lokal di tengah nilai-nilai global yang bertentangan dengan Pancasila.
2. Peluang
- Teknologi Digital: Teknologi seperti big data dan kecerdasan buatan dapat meningkatkan efektivitas organisasi masyarakat sipil dalam advokasi dan kampanye (Brynjolfsson & McAfee, 2014).
 - Kolaborasi Multi-Stakeholder: Kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil membuka peluang untuk mengatasi tantangan global.
 - Generasi Muda: Generasi muda yang melek teknologi memiliki potensi besar sebagai agen perubahan sosial.
 - Ekonomi Kreatif: Sektor ekonomi kreatif memberikan peluang baru untuk memberdayakan masyarakat dan memperkuat nilai-nilai lokal.
3. Strategi Menghadapi Tantangan
- Penguatan Kapasitas Organisasi: Organisasi masyarakat sipil perlu meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dan manajemen organisasi.
 - Pengembangan Jaringan: Membangun kemitraan dengan pihak lain untuk memperluas pengaruh dan dampak kerja organisasi.

- Inovasi dan Adaptasi: Pemanfaatan teknologi digital untuk menjangkau lebih banyak masyarakat.
- Pendidikan Nilai Pancasila: Pendidikan yang menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak dini untuk membentuk generasi yang berintegritas dan toleran (Tilaar, 2012).

Dengan memanfaatkan peluang dan mengatasi tantangan ini, implementasi nilai-nilai Pancasila dapat diperkuat dalam membangun masyarakat sipil yang beradab, inklusif, dan demokratis.

5. Simpulan

Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam civil society memiliki peran strategis dalam membangun masyarakat yang adil, inklusif, dan beradab. Setiap sila Pancasila memberikan panduan moral dan etika yang relevan untuk diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari pluralisme agama, pembelaan hak asasi manusia, integrasi nasional, demokrasi partisipatif, hingga pembangunan berkelanjutan.

Di era reformasi, civil society berkontribusi secara signifikan dalam memajukan demokrasi, menegakkan transparansi, dan mengatasi tantangan sosial seperti ketimpangan dan radikalisme. Meskipun tantangan seperti disinformasi, perubahan iklim, dan globalisasi dapat menghambat implementasi nilai-nilai Pancasila, peluang dari teknologi digital, kolaborasi multi-stakeholder, dan ekonomi kreatif memberikan harapan untuk masa depan yang lebih baik.

Penting bagi seluruh elemen bangsa, termasuk pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat umum, untuk bekerja sama dalam menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, visi membangun masyarakat yang sejahtera, bermartabat, dan berkeadilan dapat terwujud sesuai dengan cita-cita luhur Pancasila.

Daftar Referensi

References

- Bahmueller, C. F. (1992). *Civic Education and the Civil Society*. ERIC Clearinghouse for Social Studies/Social Science Education.
- Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014). *The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies*. W.W. Norton & Company.
- Dahl, R. A. (1989). *Democracy and Its Critics*. Yale University Press.

- Effendi, B. (2007). *Dimensi Etis Politik dan Pemerintahan*. Penerbit Buku Kompas.
- Fukuyama, F. (1995). *Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity*. Free Press.
- Galtung, J. (1996). *Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization*. Sage Publications.
- Kaelan. (2010). *Pendidikan Pancasila*. Paradigma.
- Rahardjo, D. (2002). *Membangun Masyarakat Madani*. Gema Insani Press.
- Sachs, J. D. (2015). *The Age of Sustainable Development*. Columbia University Press.
- Seligman, A. B. (1992). *The Idea of Civil Society*. Princeton University Press.
- Sunstein, C. R. (2001). *Republic.com*. Princeton University Press.
- Tilaar, H. A. R. (2012). *Pendidikan Karakter dalam Pembangunan Bangsa*. Rineka Cipta.
- Wardle, C., & Derakhshan, H. (2017). *Information Disorder: Toward an Interdisciplinary Framework for Research and Policy Making*. Council of Europe.